

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh suatu tindakan yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum ini akhirnya menimbulkan kewajiban negara. Negara sebagai pemangku kewajiban diharapkan dapat memenuhi hak yang dimiliki warganya. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah pengusuran di Kampung Tambakrejo. Pengusuran Kampung Tambakrejo dilakukan Pemkot Semarang untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Semarang. Melalui pengusuran yang dilakukan di Kampung Tambakrejo, 97 KK harus kehilangan hak atas perumahan yang layak. Melalui permasalahan ini dapat diketahui bagaimana pemenuhan hak adabagaimana upaya negara dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi warga Kampung Tambakrejo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosial-legal dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yang berupa wawancara dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hak atas perumahan yang layak merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap orang. Meskipun pengusuran di Kampung Tambakrejo merupakan hal yang legal yaitu sebagai salah satu tindakan untuk melaksanakan kepentingan umum yang menyangkut hidup orang banyak namun tetapi harus dipikirkan bagi korban yang terkena dampak pengusuran. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi HAM warganya walaupun belum secara maksimal karena belum adanya putusan akhir dari kasus tersebut.

Kata kunci: Kewajiban Negara, Hak Atas Perumahan yang Layak, Kampung Tambakrejo

ABSTRACT

This research is motivated by an action taken by the state, in this case the government. Actions taken in the public interest ultimately lead to state obligations. The state as an obligation holder is expected to fulfill the rights of its citizens. One of the events that occurred was the eviction in Tambakrejo Village. The eviction of Tambakrejo Village was carried out by the Semarang City Government to overcome the problem of flooding that often occurs in the city of Semarang. Through the evictions that were carried out in Tambakrejo Village, 97 families had to lose their rights to adequate housing. Through this problem, it can be seen how the fulfillment of rights and how the state's efforts to fulfill the right to adequate housing for residents of Tambakrejo Village. This study uses a socio-legal approach with a research specification that is descriptive analytical. The data used in this research is primary data in the form of interviews with literature study. Data analysis was performed using qualitative methods. The right to adequate housing is a basic right that must be owned by everyone. Even though the eviction in Tambakrejo Village is legal, that is, as an action to carry out the public interest which concerns the lives of many people, it must be considered for the victims affected by the eviction. Therefore, the state has an obligation to protect, respect and fulfill the human rights of its citizens, although not maximally because there is no final decision on the case.

Keywords: State Obligations, Right to Adequate Housing, Tambakrejo Village